

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Provinsi Banten

Provinsi Banten terletak di wilayah paling barat di Pulau Jawa. Secara geografis terletak di antara $5^{\circ}7'50''$ - $7^{\circ}1'11''$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}1'11''$ - $106^{\circ}7'12''$ Bujur Timur dengan luas wilayah adalah $9.160,70 \text{ km}^2$ (UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten). Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat disebelah Timur, sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah Barat dengan Selat Sunda.

Secara administratif provinsi Banten terdiri 4 kota dan 4 kabupaten dengan 154 kecamatan dan 1.273 desa. Iklim wilayah dipengaruhi oleh angin Muson dan gelombang Lanina (Elnino) yang pada saat musim hujan (November-Maret) cuaca didominasi angin barat dari Samudera Hindia (Sebelah Selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Iklim di Provinsi Banten secara umum pada musim kemarau (Juni-Agustus) cuaca didominasi angin yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan terutama wilayah Pantai Utara.

Provinsi Banten memiliki kekayaan dan keberagaman sumber daya alam yang terdiri dari 42.537,55 Ha hutan produksi tetap dan 29.757,92 Ha hutan produksi terbatas. Di samping itu, sumber daya lahan untuk perkembangan pertanian yang sudah dikembangkan 84.315,40Ha lahan persawahan teririgasi, 90.423,50Ha sawah tadah hujan, dan 161.247,60Ha area perkebunan dan belum termasuk lahan-lahan pertanian yang diusahakan untuk budidaya palawija, hortikultura,

sayuran dan buahbuahan. Dari sisi pertambangan dan energi, sumber daya mineral sebagian besar telah diusahakan oleh pihak swasta dan masyarakat seperti zeloit, bentonit, sirtu, pasir kuarsa, batu gamping, felspar, bondclay, lempung, fosfat, marmer, pasir laut, emas, dan batubara. Di samping itu, belum dimanfaatkannya sumber daya energi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber energi pembangkit listrik seperti: sumber daya energi fosfil (batubara) sebanyak 10,3 juta yang tersebar di wilayah Banten Selatan, energi panas bumi sebesar 230Mwe, tenaga air skala kecil, biomassa, tenaga surya sebesar 3,5KWH/m² /hari, tenaga angin di wilayah pantai selatan kecepatan angin rata-rata 2-6m/detik, dan energi gelombang laut. Wilayah pesisir dan laut Provinsi Banten dengan luas perairan 11.134,22 km² (belum termasuk perairan nusantara/teritorial dan ZEEI yang dapat dimanfaatkan), dengan panjang garis pantai 509 km, serta 55 pulau-pulau kecil dan pulau terluar yang menyimpan kekayaan dan keragaman sumber daya pesisir dan laut. Ada pula potensi geowisata yang belum dimanfaatkan secara optimal yang dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD Provinsi Banten antara lain adalah Ex. PT. Antam Cikotok, Batu Fossil Sajira-Lebak, Sumber Panas Bumi Cipanas, Gunung Karang, Cinangka dan Padarincang. Sebagian besar masyarakat Banten memeluk agama Islam dengan semangat religius yang tinggi, sedangkan pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Masyarakat Provinsi Banten umumnya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Sebagian besar penduduknya masih tinggal di wilayah pedesaan dan dalam bentuk keluarga besar. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten antara lain seni bela diri Pencak silat, Debus, Rampak Bedug, Umbruk, Tari Topeng, Tari Cokek, Dog-dog, Palingtung, dan Lojor. Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan budaya leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, dan masih banyak peninggalan lainnya. Di Provinsi Banten terdapat suku yang

sangat dikenal oleh masyarakat luar wilayah Provinsi Banten yaitu Suku Baduy. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi antimodernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Namun kini Suku Baduy terpecah menjadi dua bagian yaitu Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Suku Baduy Dalam masih sangat menjaga tradisi antimodernisasi, lain halnya dengan Suku Baduy Luar yang saat ini telah menerima perubahan zaman dan mulai terbiasa hidup secara modern dan terbuka. Suku Baduy-Rawayan tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 ha di daerah Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang yang harus dipelihara dan dijaga dengan baik.

Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berkomunikasi menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda Kuno. Dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern, yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar (informal), yang pertama tercipta pada masa Kesultanan Mataram menguasai Priangan (bagian timur Provinsi Jawa Barat). Namun, di Wilayah Banten Selatan Seperti Lebak dan Pandeglang menggunakan bahasa Sunda Campuran Sunda Kuno, Sunda Modern, dan bahasa Indonesia. Di Kota Serang dan Kota Cilegon menggunakan dialek bahasa Jawa Banten yang digunakan oleh etnik Jawa. Sedangkan di bagian utara Kota Tangerang menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi. Di samping bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh pendatang dari luar wilayah Provinsi Banten.

Provinsi Banten mempunyai jumlah penduduk (juta orang) sebesar 10,6 pada tahun 2010 dengan laki – laki 5,4 juta dan perempuan 5,2 juta. Dan pada tahun 2016 jumlah penduduk menjadi 12,2 juta dengan 6,2 jumlah laki–laki dan 6,0 juta jumlah perempuan di Provinsi Banten. Kepadatan penduduk pada tahun 2010 sebesar 1.100 Orang/ KM^2 dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 1.264 Orang/ KM^2 .

Setiap tahun selama periode Agustus 2014- Februari 2016, antara enam sampai tujuh orang dari sepuluh orang penduduk usia kerja Banten (penduduk usia 15 tahun ke atas), telah memasuki pasar kerja. Kondisi ini terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang memberikan gambaran mengenai besarnya persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam bagian angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Banten sendiri selama periode tersebut cenderung bertambah, yaitu dari 5,34 juta orang menjadi 5,69 juta orang. Seiring dengan jumlah angkatan kerja yang bertambah, persentase penduduk usia kerja yang bekerja juga meningkat. Peningkatan ini, terjadi karena kesempatan kerja yang tercipta melebihi pertambahan jumlah angkatan kerja. Imbasnya, Pengangguran Terdidik di Provinsi Banten menurun hingga menjadi 7,95 persen pada Februari 2016. Hanya saja, angka pengangguran ini terasa sangat tinggi, karena masih tetap jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya sebesar 5,50 persen.

Perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah tidak terlepas dari pendidikan yang merupakan penentu kualitas penduduk. Kualitas penduduk Banten sendiri sepanjang periode 2013-2015 meningkat cukup pesat. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), hingga mencapai 8,3 tahun dan 5,8 persen pada tahun 2015. Bahkan, kualitas penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Nasional, yang memiliki RLS dan APT hanya 7,8 tahun dan 5,6 persen. Kualitas penduduk Banten yang

meningkat ternyata didorong oleh semakin luasnya akses penduduk terhadap pendidikan. Hal ini ditandai oleh angka partisipasi sekolah (APS) untuk berbagai kelompok usia yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, masih rendahnya APS kelompok usia 16-18 tahun, harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang hanya 66,73 persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk Banten usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2015 tidak bersekolah lagi. Kualitas pendidikan penduduk berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikatornya adalah rasio ketersediaan sekolah (RKS), yang dapat menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa RKS SMP/MTs dan SMA/SMK/MI mengalami penurunan. Berarti, ketersediaan gedung sekolahnya meningkat melebihi pertambahan penduduk usia sekolah. Sementara untuk gedung sekolah SD/MI, peningkatannya sedikit dibawah pertambahan penduduk usia sekolahnya.

B. Gambaran Umum Variabel

1. Pengangguran Terdidik

Menurut Sari (2010) bahwa “Pengangguran terdidik secara potensial dapat menyebabkan berbagai macam masalah dengan tingkat rawan yang lebih tinggi, menciptakan pemborosan sumber daya pendidikan, dan menurunkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan karena tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan”.

Menurut Badan Pusat Statistik pada buku Profil Ketenagakerjaan (2010) bahwa “Tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA, Sarjana Muda, atau Sarjana (sebagai kelompok terdidik) yang tidak bekerja”. Selain itu menurut Sumarsono (2009), bahwa “Pengangguran terdidik adalah angkatan kerja yang berpendidikan

menengah ke atas yaitu SMA, Diploma, dan Sarjana yang tidak bekerja. Pengangguran tenaga kerja terdidik adalah salah satu masalah makro ekonomi, adapun faktor-faktor penyebab tenaga kerja terdidik dapat dikatakan hampir sama di setiap negara, yaitu krisis ekonomi, struktur lapangan kerja yang tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang, dan jumlah angkatan kerja yang lebih besar jika dibandingkan dengan kesempatan kerja”.

Tabel 4.1
Perkembangan Pengangguran Terdidik di Provinsi Banten Kurun Waktu 2010 – 2016

No	Kab/Kota	Pengangguran Terdidik (%)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Pandenglang	11,34	11,32	9,3	12,34	7,03	10,22	9,31
2.	Kab. Lebak	13,35	12,1	9,07	7,23	9,57	10,74	9,08
3.	Kab. Tangerang	14,01	14,42	11,46	11,94	8,45	9	11,14
4.	Kab. Serang	16,19	13,26	12,69	13,69	14,78	14,8	12,97
5.	Kota Tangerang	14,09	12,89	8,31	8,62	7,81	8	8,93
6.	Kota Cilegon	0,85	13,14	11,31	7,16	11,83	12	11,32
7.	Kota Serang	17,11	13,84	10,8	11,29	10,03	9,49	10,81
8.	Kota Tangerang Selatan	8,22	11,98	8,07	4,56	6,92	6,13	8,08

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Banten

Pada tabel 4.1 dapat dilihat pergerakan jumlah pengangguran terdidik di Provinsi Banten kurun waktu 2010–2016 berbeda-beda. Pada tahun 2010–2011 mengalami penurunan sebesar 10.15% , lalu pada tahun 2011–2012 pun mengalami penurunan kembali sebesar 8.004%. Pada tahun 2012–2013 mengalami penurunan kembali sebesar 7.601% dan tahun 2013–2014 mengalami penurunan kembali hanya sebesar 0,41%. Namun pada tahun 2015-2016 mengalami

kenaikkan sebesar 3.96% pada pengangguran terdidik di Provinsi Banten sehingga berdampak pada pengangguran terdidik dengan tidak adanya kemajuan pada menambah perusahaan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan kemerosotan produktifitas sumber daya manusia dan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya manusia.

C. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Upah

Sukirno (2010) menyimpulkan bahwa “Upah diartikan sebagai pembiayaan jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran atas jasa-jasa tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap”.

Tabel 4.2
Perkembangan Upah di Provinsi Banten Kurun Waktu 2010 – 2016

No	Kab/Kota	Upah (Rp.)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Pandenglang	964.500	1.015.000	1.050.000	1.182.000	1.418.000	1.737.000	1.999.981
2.	Kab. Lebak	959.500	1.007.500	1.047.800	1.187.500	1.490.000	1.728.000	1.965.000
3.	Kab. Tangerang	1.117.245	1.285.000	1.527.000	2.200.000	2.442.000	2.710.000	3.021.000
4.	Kab. Serang	1.101.000	1.189.600	1.320.500	2.080.000	2.340.000	2.700.000	3.010.500
5.	Kota Tangerang	1.118.009	1.290.000	1.527.000	2.203.000	2.444.301	2.730.000	2.730.000
6.	Kota Cilegon	1.174.000	1.224.000	1.347.000	2.200.000	2.443.000	2.760.590	3.078.056
7.	Kota Serang	1.050.000	1.156.000	1.231.000	1.798.446	2.166.000	2.375.000	2.648.125
8.	Kota Tangerang	1.117.245	1.290.000	1.527.000	2.200.000	2.442.000	2.710.000	3.021.000

	Selatan							
--	---------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Banten

Pada tabel 4.2 menjelaskan data upah minimum regional (UMR) bahwa setiap tahunnya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan selalu paling terbesar dari kabupaten dan kota lainnya, dan Kabupaten Pandenglang UMR yang rendah setiap tahunnya. Karena Pandenglang bukan pusat perdagangan ataupun pemerintahan dengan jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Formula perhitungan dari upah minimum tiap tahun adalah upah minimum lama ditambah dengan Index Harga Konsumen (IHK) dan ditambah nilai produktivitas. Selain itu perhitungan upah minimum tersebut akan dikalikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. Dari hasil perhitungan tadi, Irianto menemukan kenaikan upah minimum sebesar 10%-11% setiap tahun."Jadi kita merujuk Undang-undang No 13 Tahun 2003 (tentang ketenagakerjaan), penetapan upah minimum itu mempertimbangkan KHL (kebutuhan hidup layak), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk yang dimaksud adalah mereka atau sekumpulan manusia yang sudah menetap disuatu wilayah paling sedikit selama 6 bulan atau kurang dari 6 bulan, tetapi yang dimaksud untuk menetap (BPS,2012). Transisi demografi adalah nama untuk pergeseran dari jumlah penduduk yang stabil pada tingkat kelahiran dan kematian tinggi kejumlah penduduk dengan tingkat kelahiran dan kematian yang rendah (Sanusi 2004).

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Kurun Waktu 2010 – 2016

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Pandenglan g	1.149.610	1.172.179	1.181.430	1.183.006	1.188.405	1.194.911	1.200.512
2.	Kab. Lebak	1.204.095	1.228.884	1.239.660	1.247.906	1.259.305	1.269.812	1.279.412
3.	Kab. Tanggeran g	2.834.376	2.960.474	3.050.929	3.157.780	3.264.776	3.370.594	3.477.495
4.	Kab. Serang	1.402.818	1.433.137	1.448.964	1.450.894	1.463.094	1.474.301	1.484.502
5.	Kota Tanggeran g	1.798.601	1.869.791	1.918.556	1.952.396	1.999.894	2.047.105	2.093.706
6.	Kota Cilegon	374.559	385.720	392.341	398.304	405.303	412.106	418.705
7.	Kota Serang	643.101	598.407	611.897	618.802	631.101	643.205	655.004
8.	Kota Tanggeran g Selatan	1.303.569	1.346.102	1.394.405	1.443.403	1.492.999	1.543.209	1.593.812

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Banten

Pada tabel 4.3 menjelaskan sebuah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada kurun waktu 7 tahun. Pada tahun 2016 jumlah penduduk paling banyak di kabupaten adalah Kabupaten Tanggerang 3.477.495 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling banyak di Kota adalah Kota Tanggerang sebesar 2.093.706 jiwa. Namun sebaliknya kabupaten jumlah penduduk yang sedikit adalah kabupaten Pandenglang sebesar 1.200.512 juta jiwa dan jumlah penduduk di kota yang sedikit yaitu Cilegon sebesar 418.705 jiwa.

Para ahli ekonomi lebih percaya bahwa demografi dengan penekanan pada akar ekonomi dari tingkah laku manusia sudah memberikan jawaban yang memuaskan dibandingkan dengan kerangka teoritis lainnya. Mereka dapat dapat menolak model-model demografi yang hanya bersifat mekanis model-model yang hanya mencari ketertiban dalam tingkah laku manusia tanpa menyelidiki motif yang terletak dibalik tingkah laku itu. Transisi demografi adalah nama untuk pergeseran dari jumlah penduduk yang stabil pada tingkat kelahiran dan kematian tinggi kejumlah penduduk dengan tingkat kelahiran dan kematian yang rendah (Sanusi 2004).

3. Pendidikan

Pendidikan kualitas sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan kualitas manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan kecerdasan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan, melalui pendidikan yang baik. Kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dapat lebih ditingkatkan, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu merubah sikap pengetahuan dan perilaku peserta pendidikan sesuai yang diharapkan.

Tabel 4.4
Pendidikan di Provinsi Banten Kurun Waktu 2010 – 2016

No	Kab/Kota	Pendidikan (%)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Pandenglang	65,31	68,59	63,7	78,54	86,73	91,70	98,63
2.	Kab. Lebak	39,76	41,59	44,26	65,05	69,7	81,42	91,93
3.	Kab. Tangerang	43,72	48,88	58,66	62,73	75,47	82,39	90,78
4.	Kab. Serang	58,98	61,39	51,72	77,29	65,75	62,39	51,72
5.	Kota Tangerang	64,24	65,09	95,43	91,47	97,23	110,41	119,66
No.	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.	Kota	77,88	79,04	82,72	93,71	100,62	107,95	115,52

	Cilegon							
7.	Kota Serang	65,56	69,46	72,91	63,63	84,6	81,68	85,30
8.	Kota Tangerang Selatan	105,67	102,4	97,17	99,31	105,58	104,03	105,20

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Banten

Pada tabel 4.4 menunjukkan perkembangan pendidikan pada usia 16-18 dan 19-24 terjadi naik turun setiap tahunnya. Kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dapat lebih ditingkatkan, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu merubah sikap pengetahuan dan prilaku peserta pendidikan sesuai yang diharapkan. Indikator kualitas SDM dapat berupa tingkat pendidikan dan tingkat penduduknya.

Dengan demikian negara berkembang seperti Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi memerlukan SDM yang berkualitas. Namun, tingginya kualitas itu tidak dapat diukur dengan angka-angka semata, melainkan diukur dengan apa yang dihasilkan. Besarnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan dan kesehatan menjadi ukuran yang menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas SDM. Investasi SDM yang dilakukan negara-negara maju sangat menentukan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi riil.

4. Investasi

Investasi merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terpusat hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Pada dasarnya letak geografis Provinsi Banten adalah di ujung barat pulau Jawa dan langsung bersebrangan dengan Pulau Sumatra, Provinsi Banten sendiri menjadi provinsi

penyatu ekonomi antara Jawa dan Sumatra dikarenakan Provinsi Banten besar dengan industri pengolahan dan transportasi. Selain sebagai daerah penyangga bagi Ibukota DKI Jakarta, Provinsi Banten juga memiliki terkenal dengan berbagai infrastruktur strategis seperti pelabuhan Merak dan Cigading, Bandara Soekarno-Hatta dan Jalan Tol Jakarta-Merak serta memiliki akses yang sangat mudah menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah utama tujuan investasi di Indonesia. Pada tahun 2014 sendiri investasi Provinsi Banten tercatat menduduki urutan ke-5 di Indonesia dimana peringkat ke-6 untuk investasi dalam negeri dan urutan ke-4 pada investasi asing. Provinsi banten sendiri memang di kategorikan baru jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain di Indonesia akan tetapi nilai pembangunannya cukup tinggi dikarenakan Provinsi Banten sendiri memang lagi giat-giatnya membangun perekonomian daerah yang di cetuskan oleh pemerintah daerah.

Tabel 4.5
Investasi di Provinsi Banten Kurun Waktu 2010 – 2016

No	Kab/Kota	Investasi (Juta)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Pandenglang	1.455.097	627.443	733.611	865.349	901.176	879.918	718.136
2.	Kab. Lebak	1.433.917	700.214	863.780	964.121	1.120.481	1.114.549	1.009.274
3.	Kab. Tangerang	23.085.862	8.618.184	9.866.962	12.131.843	13.275.390	14.711.366	11.051.336
4.	Kab. Serang	4.098.169	1.321.901	1.839.266	2.109.528	2.212.608	2.623.721	1.924.546
5.	Kota Tangerang	11.649.279	3.490.138	3.773.307	5.244.556	7.033.368	8.057.056	5.955.266
6.	Kota Cilegon	2.654.315	1.127.182	1.482.018	1.987.910	2.183.284	2.233.621	2.101.794
7.	Kota Serang	2.600.866	140.457	269.556	379.587	683.850	683.850	854.066
8.	Kota Tangerang Selatan	382.013	377.031	34.077	107.445	42.1732	1.083.412	772.398

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Banten

Pada tabel 4.5 menunjukkan di atas adalah di atas menjelaskan realisasi investasi PMDN dan PMA Provinsi Banten lebih relatif tidak stabil di karnakan di setiap kabupaten/kota besar nilainya investasi tergantung pada proyek-proyek yang di kerjakan. Seperti halnya Kota Cilegon sendiri Kabupaten/Kota dengan nilai investasi terbesar di Provinsi Banten di sebabkan di kota tersebut banyak sekali pembangunan-pembangunan atau proyek-proyek besar seperti pembagunan jalan tol jakarta – banten kemudian memiliki pelabuhan tebesar seindonesia dan terakhir banyak di jumpai industri-industri pengolahan serta. Selanjutnya di susul oleh Kabupaten Tangerang dengan nilai investasi terbesar kedua. Di sebabkan Kabupaten Tangerang banyak di jumpai daerah perkantoran dan sektor industri transportasi udara serta banyak sektor perhotelan.